

**PENGEMBANGAN POTENSI PARIWISATA UNTUK MENINGKATKAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH BERDASARKAN PASAL 9 HURUF b
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI NOMOR 13
TAHUN 2012 TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN
KEPARIWISATAAN**

(Studi di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi)

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-syarat Memperoleh
Gelar Kesarjanaan dalam Ilmu Hukum**

Oleh:

**DWI YULY SULISTYORINI
NIM : 145010107111141**



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2018**

LEMBAR PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **PENGEMBANGAN POTENSI PARIWISATA
UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN
ASLI DAERAH BERDASARKAN PASAL 9
HURUF b PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI NOMOR 13
TAHUN 2012 TENTANG RENCANA INDUK
PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN (Studi
di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten
Banyuwangi)**

Identitas Penulis

a. Nama : **Dwi Yuly Sulistyorini**

b. NIM : **145010107111141**

Konsentrasi : **Hukum Administrasi Negara**

Jangka Waktu Penelitian : **4 Bulan**

Di setuju pada tanggal :

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Lutfi Effendi S.H., M.Hum.
NIP. 196008101986011002

Dr. Indah Dwi Qurbani S.H., M.H.
NIK. 2016078010272001

Mengetahui,
Ketua Bagian
Hukum Administrasi Negara

Lutfi Effendi S.H., M.Hum.
NIP. 196008101986011002

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

PENGEMBANGAN POTENSI PARIWISATA UNTUK MENINGKATKAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH BERDASARKAN PASAL 9 HURUF b
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI NOMOR 13 TAHUN
2012 TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
(Studi di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi)

DWI YULY SULISTYORINI
NIM : 145010107111141

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Majelis Penguji pada tanggal 10 Juli
2018 dan disahkan pada tanggal:

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

Lutfi Effendi, SH.,M.Hum
NIP. 196008101986011002

Dr. Indah Dwi Qurbani SH.,M.H
NIK. 2016078010272001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum

Ketua Bagian
Hukum Administrasi Negara

Dr. Rachmad Safa'at, SH.,M.Si
NIP. 196208051988021001

Lutfi Effendi, SH.,M.Hum
NIP. 196008101986011002

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan bahwa karya ilmiah hukum ini adalah hasil kerja saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya.

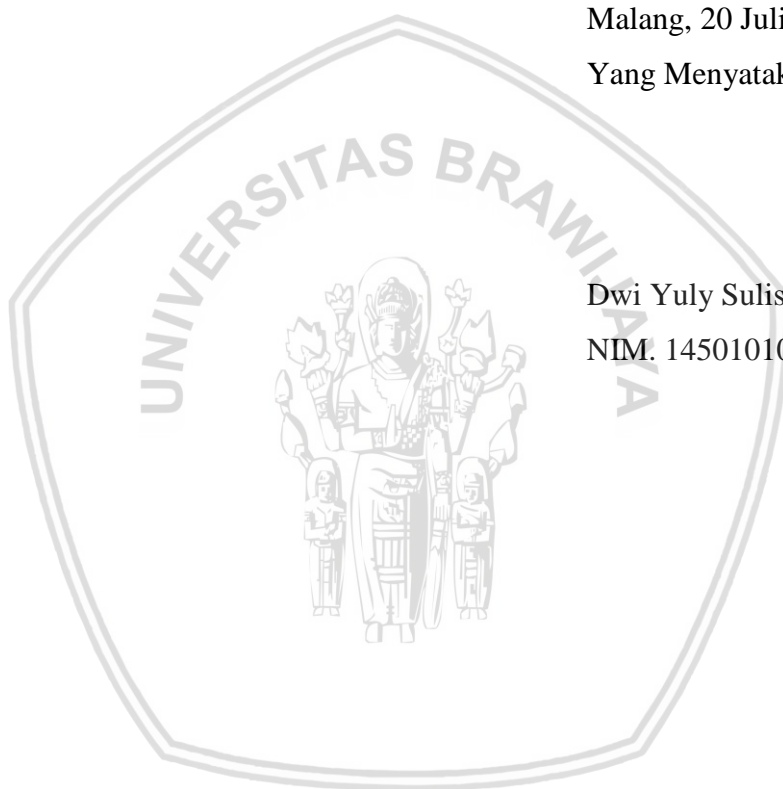
Jika di kemudian hari, terbukti karya ini merupakan karya orang lain, saya sanggup dicabut atas gelar kesarjanaan saya.

Malang, 20 Juli 2018

Yang Menyatakan

Dwi Yuly Sulistyorini

NIM. 145010107111141



KATA PENGANTAR

Segala puji penulis panjatkan hanya kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan rahmat dan karunia yang tiada henti hingga penulis dapat sampai pada tahap ini, khususnya dengan selesainya skripsi ini.

Terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Dr. Rachmad Safa'at, SH., M.Si. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
2. Bapak Lutfi Effendi, S.H., M.Hum. selaku Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara dan selaku Dosen Pembimbing Utama, atas bimbingan dan kesabarannya.
3. Ibu Dr. Indah Dwi Qurbani, S.h., M.H., selaku Dosen Pembimbing Pendamping, atas bimbingan dan kesabarannya.
4. Orang Tua saya Bapak Sujito dan Ibu Enggarwati, atas segala dukungan dan doa yang diberikan.
5. Saudara-saudara saya, Kakak saya Prabowo Adhi Sulisty, Adik saya Try Agus Setia Budi, dan Ferdi Yulian Caesar, atas segala dukungan dan doanya.
6. Keluarga, kerabat, sahabat, dan teman-teman, yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu, atas segala dukungan dan doanya.
7. Pihak-pihak lain yang turut membantu selesainya skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Penulis yakin skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna, sehingga masukan dan kritik akan selalu penulis harapkan untuk memperbaiki skripsi ini.

Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses pembuatan skripsi ini penulis melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa mengampuni kesalahan kita dan berkenan menunjukkan jalan yang benar.

Malang, 20 Juli 2018

Dwi Yuly Sulistyorini

DAFTAR ISI

Lembar Persetujuan	i
Lembar Pengesahan.....	ii
Pernyataan Keaslian Skripsi	iii
Kata Pengantar	iv
Daftar Isi	v
Daftar Tabel.....	vii
Ringakasan	viii
Summary.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Sistematika Penulisan.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Otonomi Daerah	14
B. Keuangan Daerah	17
C. Pendapatan Asli Daerah	18
D. Pariwisata	23
E. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	24
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	26
B. Pendekatan Penelitian	26
C. Lokasi Penelitian	27
D. Jenis Data	28
E. Teknik Pengumpulan Data	29
F. Populasi dan Sampel	29
G. Teknik Analisis Data.....	30
H. Definisi Operasional.....	30
BAB IV PEMBAHASAN	
A. Gmbaran Umum Lokasi Penelitian.....	33
1. Gambaran Umum Tentang Kabupaten Banyuwangi	34
a. Visi dan Misi.....	34
b. Data Geografis Kabupaten Banyuwangi	37
2. Gambaran Umum Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
a. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi	39
b. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Terdiri Dari	40
B. Pengembangan Potensi Pariwisata Guna Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banyuwangi.....	41
1. Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banyuwangi	44
2. Pengembangan Pantai Grand Watu Dodol dan Implikasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banyuwangi	46
C. Hambatan dan Upaya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi Berdasarkan Pasal 9 Huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Banyuwangi	49



1. Hambatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi dalam Pengembangan Potensi Pariwisata 50
2. Upaya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi dalam menyelesaikan hambatan Pengembangan Potensi Pariwisata 52

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan..... 53
- B. Saran..... 55

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Orisinalitas Penelitian	8
Tabel 2. Realisasi Target Pendapatan P-APBD 2017 Dinas Pariwisata Kabupaten Banyuwangi	45
Tabel 3. Pendapatan GWD Tahun 2016 Hingga 2017.....	47



RINGKASAN

Dwi Yuly Sulistyorini, Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Juni 2018, PENGEMBANGAN POTENSI PARIWISATA UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH BERDASARKAN PASAL 9 HURUF B PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN BANYUWANGI (Studi Di Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi), Lutfi Efendi , S.H., M.Hum., Dr. Indah Dwi Qurbani S.H., M.H.,

Suatu daerah dianggap mampu melaksanakan otonomi jika memiliki kemampuan keuangan daerah, yang berarti daerah tersebut harus memiliki kemampuan dan kewenangan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangannya sendiri untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan. Faktor utama yang menjadi sumber daya finansial bagi pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah faktor keuangan. Salah satu sumber daya finansial yang dapat mendukung fungsi pemerintahan daerah adalah Pendapatan Asli Daerah. Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang penting untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah. Bidang pariwisata merupakan salah satu sektor yang mempunyai peranan yang sangat penting dalam menunjang pendapatan daerah serta pembangunan perekonomian. Salah satu daerah di Provinsi Jawa Timur yang saat ini sedang bersemangat dalam pembangunan pada sektor pariwisata adalah Kabupaten Banyuwangi. Kabupaten Banyuwangi mempunyai potensi yang cukup besar di bidang pariwisata untuk dikembangkan, dengan terdapatnya berbagai macam destinasi wisata. Dari beberapa destinasi wisata yang ada di Kabupaten Banyuwangi salah satunya wisata Pantai Grand Watu Dodol (GWD). Tempat wisata pantai baru ini memiliki berbagai fasilitas seperti restoran, *banana boat*, serta *snorkeling* dari Pantai GWD, Pulau Menjangan hingga Pulau Tabuhan.

Berdasarkan latar belakang diatas, fokus permasalahan pada penelitian ini adalah bagaimana pengembangan potensi pariwisata untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Banyuwangi dan Bagaimanakah upaya yang dilakukan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi berdasarkan ketentuan Pasal 9 huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Banyuwangi.

Guna menjawab rumusan masalah, penelitian ini menggunakan Jenis penelitian Yuridis Empiris (*Empiric Legal Research*) dengan metode pendekatan metode pendekatan yuridis sosiologis. Data primer dan sekunder dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analitis.

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti memperoleh penjelasan bahwa Pengembangan potensi pariwisata untuk meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Banyuwangi dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Salah satu pariwisata yang dikembangkan adalah Pantai Grand Watu Dodol. Pantai

GWD adalah pariwisata yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah sehingga pendapatan yang diperoleh dari GWD merupakan retribusi jasa usaha sesuai dengan UU PDRD. Sebagaimana di jelaskan, ObjekRetribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 huruf e, pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah (Pasal 132 ayat 1 UU PDRD). Serta, Objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 huruf i adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah (Pasal 136 ayat 1 UU PDRD). Berbagai upaya telah dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi dalam menghadapi hambatan dalam pengembangan potensi pariwisata di Kabupaten Banyuwangi, dengan upaya tersebut dapat meningkatkan pendapatan asli daerah. Selain meningkatkan pendapatan asli daerah, pengembangan potensi pariwisata pantai GWD yang dilakukan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Bidang Pariwisata dapat meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar destinasi pariwisata.



SUMMARY

Dwi Yuly Sulistyorini, Law of State Administration, Faculty of Law Universitas Brawijaya, June 2018, TOURISM POTENTIAL DEVELOPMENT TO INCREASE REAL REGIONAL REVENUE BASED ON ARTICLE 9 LETTER B REGULATION OF REGENCY OF BANYUWANGI NUMBER 13 YEAR 2012 ABOUT PLAN OF DEVELOPMENT BUILDING IN REGENCY OF BANYUWANGI (Study On Culture And Tourism of Banyuwangi Regency), Lutfi Efendi, SH, M.Hum .., Dr. Indah Dwi Qurbani S.H., M.H.,

An area is considered capable of carrying out autonomy if it has regional financial capacity, which means the region must have the ability and authority to explore financial resources, manage and use its own finances to finance the administration of the government. The main factor that becomes the financial resources for financing the implementation of local government is the financial factor. One of the financial resources that can support the function of local government is the Revenue of the Region. Local taxes and user charges are one of the most important sources of local revenue to finance the implementation of local government. Tourism sector is one sector that has a very important role in supporting regional revenue and economic development. One of the areas in East Java Province that is currently being excited in the development of tourism sector is Banyuwangi Regency. Banyuwangi Regency has considerable potential in the field of tourism to be developed, with the presence of various tourist destinations. From several tourist destinations in Banyuwangi regency, one of them is Grand Watu Dodol (GWD) beach tourism. This new beach resort has various facilities such as restaurant, banana boat, and snorkeling from GWD Beach, Menjangan Island to Tabuhan Island.

Based on the above background, the focus of the problem on this research is how the development of tourism potential to increase the original income in the district of Banyuwangi and how efforts made by the Department of Culture and Tourism of Banyuwangi Regency based on the provisions of Article 9 letter b Banyuwangi Regency Regulation No. 13 of 2012 About the Plan Parent Development of Tourism Banyuwangi Regency.

In order to answer the problem formulation, this research uses Empirical Legal Research type with approach method of juridical sociology approach. Primary and secondary data were analyzed by analytical descriptive method.

Based on the results of research, the researchers obtained an explanation that the development of tourism potential to increase the original revenue of Banyuwangi regency is done by the Department of Culture and Tourism. One of the developed tourism is Grand Watu Dodol Beach. GWD Beach is tourism provided, owned and / or managed by Local Government so that the income earned from GWD is a service fee in accordance with the PDRD Law. As described, the Parking Placement Specificity referred to in Article 127 letter e, the service of the special parking spaces provided, owned and / or managed by the Regional Government (Article 132 paragraph 1 of the PDRD Law). Also, the Object of the Retribution of Recreation and Sports Places as

referred to in Article 127 letter i shall be the services of recreation, tourism and sports provided, owned and / or managed by the Regional Government (Article 136 paragraph 1 of the PDRD Law). Various efforts have been made by the Department of Culture and Tourism of Banyuwangi Regency in facing obstacles in the development of tourism potential in Banyuwangi Regency, with these efforts can increase the local revenue. In addition to increasing local revenue, the development of coastal tourism potential of GWD conducted by the Department of Culture and Tourism, Tourism Field can improve the economy of the community around the tourist destination.



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki bentuk negara kesatuan, dan memiliki sistem pemerintahan republic diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUDNRI 1945). Bentuk negara kesatuan dan sistem desentralisasi merupakan keputusan *the founding father* dalam usahanya mencapai tujuan bersama negara. Disebutkan dalam Pasal 1 ayat (3) UUDNRI 1945 Indonesia merupakan negara hukum berdasarkan Pancasila, yang bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan berbangsa yang aman, tertib, sejahtera, dan berkeadilan. Dalam penjelasan UUDNRI 1945 ditegaskan bahwa aturan hukum harus menjadi pedoman dalam kehidupan bernegara, hukum menjadi ukuran atau standar yang diperlukan dalam mengatur hubungan antara sesama warga negara, dan hukum mengatur warga negara dengan negaranya.¹ Indonesia adalah negara yang memiliki wilayah yang sangat luas, yang terdiri dari banyak pulau besar dan kecil, serta terdiri dari banyak daerah, menggunakan sistem desentralisasi yang diatur dalam Pasal 18 UUDNRI 1945.

Adanya berbagai daerah di Indonesia, maka diperlukan aturan khusus untuk mengatur tentang pemerintahan daerah. Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah, menyebabkan terjadinya

¹Ida Zuraida, **Teknik Penyusunan Peraturan Daerah**, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 2.

pemberian kewenangan yang seluas-luasnya kepada pemerintah daerah dalam menyelenggarakan fungsi pemerintahan daerah. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan yang seluas-luasnya oleh pemerintah daerah tersebut disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara. Hal tersebut perlu didukung adanya berbagai faktor sumber daya yang mampu menggerakkan jalannya pemerintahan dalam rangka pencapaian tujuan oleh pemerintah daerah.

Sistem penyelenggaraan pemerintah di Indonesia berdasarkan pendekatan kesisteman meliputi sistem pemerintahan pusat atau disebut pemerintah dan sistem pemerintahan daerah. Praktik penyelenggaraan pemerintah dalam hubungan antara pemerintahan, dikenal dengan konsep sentralisasi dan desentralisasi. Konsep sentralisasi menunjukkan karakteristik bahwa semua kewenangan penyelenggaraan pemerintahan berada di pemerintah pusat, sedangkan sistem desentralisasi menunjukkan karakteristik, yakni sebagian kewenangan urusan pemerintahan yang menjadi kewajiban pemerintah, diberikan kepada pemerintah daerah.²

Salah satu tujuan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah adalah untuk menjadikan pemerintah lebih dekat dengan rakyatnya, sehingga pelayanan pemerintah dapat dilakukan dengan lebih *efisien*, cepat, dan *efektif*. Hal ini berdasarkan asumsi bahwa pemerintah kabupaten dan kota memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai kebutuhan dan aspirasi masyarakat mereka daripada pemerintah pusat. Walaupun hal ini sangat potensial bagi

² Siswanto Sunarno, **Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia**, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 11.

kabupaten dan kota untuk lebih *responsif* terhadap aspirasi masyarakat, sebelum hal tersebut dapat terlaksana, partai politik dan kelompok masyarakat sipil yang ada di daerah perlu diperkuat untuk menjamin bahwa proses pemerintahan yang bersih dapat terlaksana.³

Pembentukan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan publik untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat di samping sebagai sarana pendidikan politik di tingkat lokal. Untuk itu, pembentukan daerah harus memerhatikan berbagai faktor, seperti kemampuan ekonomi, potensi daerah, luas wilayah, kependudukan, dan pertimbangan dari aspek sosial politik, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, serta pertimbangan dan syarat lain yang memungkinkan daerah itu dapat menyelenggarakan dan mewujudkan tujuan dibentuknya daerah dan diberikannya otonomi daerah.⁴

Penyelenggaraan otonomi daerah, penyerahan, pelimpahan dan penugasan urusan pemerintahan kepada daerah secara nyata dan bertanggung jawab harus diikuti dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumberdaya nasional secara adil, termasuk perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Penyelenggaraan pemerintah daerah dan pelayanannya dilakukan sesuai asas-asas umum pemerintahan yang baik berdasarkan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, yakni: Asas Kepastian Hukum, Asas Tertib

³ Mudrajat Kuncoro, **Otonomi Daerah Menuju Era Baru Pembangunan Daerah Edisi 3**, Erlangga, 2014, hlm. 30.

⁴Siswanto Sunarno, *Op.Cit.* , hlm.15.

Penyelenggaraan Negara, Asas Kepentingan Umum, Asas Keterbukaan, Asas Proporsionalitas, Asas Profesionalitas, dan Asas Akuntabilitas.

Indonesia merupakan negara yang terdiri dari banyak daerah yang memiliki perbedaan alokasi anggaran, potensi, serta keunggulan. Perbedaan dalam pengalokasian anggaran terlihat dalam jumlah anggaran yang diberikan pemerintah untuk tiap daerah tergantung pada kebutuhan di tiap daerah tersebut. Daerah perlu diberi sumber-sumber pembiayaan yang cukup supaya dapat mengurus rumah tangganya sendiri. Biaya rumah tangga daerah diperoleh dari berbagai sumber berikut: a) Dari Pemerintah Pusat, dalam bentuk: subsidi, sumbangan, atau bantuan Pemerintah Pusat, pinjaman dari luar negeri melalui Pemerintah Pusat, sumber-sumber penghasilan yang semula merupakan wewenang Pemerintah Pusat, tetapi kemudian diserahkan kepada Pemerintah Daerah; b) Dari sumber-sumber keuangan di daerah sendiri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti: hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah hasil perusahaan daerah, dan lain-lain usaha daerah yang sah.

Otonomi daerah di satu sisi memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada pemerintah daerah, namun di sisi lain memberikan tanggung jawab yang sangat besar bagi pemerintah daerah sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Kemandirian dalam mengelola dan mengatur rumah tangga sendiri akan terwujud dengan baik apabila terdapat dukungan publik. Hal ini relatif akan terwujud apabila terjadi proses distribusi, baik pada kebutuhan masyarakat maupun perolehan serta pembagian pendapatan untuk daerah dan masyarakat secara merata.

Suatu daerah dianggap mampu melaksanakan otonomi jika memiliki kemampuan keuangan daerah, yang berarti daerah tersebut harus memiliki kemampuan dan kewenangan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangannya sendiri untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan. Faktor utama yang menjadi sumber daya finansial bagi pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah faktor keuangan. Salah satu sumber daya finansial yang dapat mendukung fungsi pemerintahan daerah adalah Pendapatan Asli Daerah. Berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah, Pendapatan asli daerah yang selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ini berarti bahwa pemerintah daerah secara finansial haruslah independen terhadap pemerintah pusat dengan jalan sebanyak mungkin menggali sumber-sumber PAD seperti pajak, retribusi dan lain-lain. Selain itu ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin, sehingga PAD harus menjadi sumber keuangan terbesar daerah yang didukung oleh kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah, pendapatan daerah ini digunakan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah. Oleh karena itu, perlu dilakukan perluasan objek pajak dan retribusi daerah dan penetapan tarif

sehingga dapat menyederhanakan pemenuhan kewajiban perpajakan dan meningkatkan pendapatan masing-masing daerah.⁵

Bidang pariwisata merupakan salah satu sektor yang mempunyai peranan yang sangat penting dalam menunjang pembangunan perekonomian nasional, pada era globalisasi saat ini. Sektor pariwisata ini sebagai salah satu sumber penghasil devisa yang banyak, juga merupakan sektor yang mampu menampung tenaga kerja dan mendorong perkembangan investasi. Sehingga, untuk mengembangkan sektor ini pemerintah berusaha keras membuat rencana dan berbagai kebijakan yang mampu mendukung kemajuan di sektor pariwisata ini.

Salah satu daerah di Provinsi Jawa Timur yang saat ini sedang bersemangat dalam pembangunan pada sektor pariwisata adalah Kabupaten Banyuwangi. Banyuwangi adalah Kabupaten yang berada di ujung paling timur Provinsi Jawa Timur. Di sebelah utara, Banyuwangi berbatasan dengan Kabupaten Situbondo, sedangkan sebelah timur berbatasan dengan Selat Bali, dan sebelah selatan berbatasan dengan Samudera Hindia. Secara Geografis, Banyuwangi terletak pada koordinat 7°45'15"-80°43'2" Bujur Timur.⁶ Posisi tersebut membuat Banyuwangi memiliki keragaman pemandangan alam yang membentang luas, kekayaan seni dan budaya, serta adat istiadat.

Kabupaten Banyuwangi mempunyai potensi yang cukup besar di bidang pariwisata untuk dikembangkan, dengan terdapatnya berbagai macam destinasi wisata, Seperti Gunung (Ijen), Pantai (Boom, Pulau Merah,dll), Taman

⁵ Roristua Pandiangan, **Hukum Pajak**, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2015, hlm.195.

⁶ Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi, dalam buku **Visitor's Guide Book Banyuwangi East Java Indonesia**, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi, Banyuwangi, 2017. hlm.3.

Nasional Alas Purwo. Dari beberapa destinasi wisata yang ada di Kabupaten Banyuwangi salah satunya wisata Pantai Grand Watu Dodol (GWD). Tempat wisata pantai baru ini memiliki berbagai fasilitas seperti restoran, *banana boat*, serta *snorkeling* dari Pantai GWD, Pulau Menjangan hingga Pulau Tabuhan. Kawasan Wisata Pantai GWD menjadi pintu masuk ke Kabupaten Banyuwangi apabila dari arah wilayah Kabupaten Situbondo. Nama Watu Dodol sendiri merujuk kepada sebuah batu besar setinggi 6 meter yang berlokasi tepat di antara kedua ruas jalan raya di depan destinasi wisata Pantai GWD. Lokasi kawasan wisata ini terletak di Desa Ketapang, Kecamatan Kalipuro, arah utara sekitar 5 kilometer dari Pelabuhan Ketapang, Kabupaten Banyuwangi.

Beberapa tahun terakhir, kemajuan telah diraih oleh Kabupaten Banyuwangi. Terkait pariwisata, Kabupaten Banyuwangi saat ini menjadi salah satu destinasi favorit wisatawan. Pembenahan berbagai destinasi dan program wisata telah membuat sektor pariwisata di kabupaten ini menarik perhatian wisatawan. Kabupaten Banyuwangi berhasil meraih penghargaan dari Badan Pariwisata Perserikatan Bangsa-Bangsa (*The United Nations World Tourism Organization/UNWTO*) dalam ajang 12th UNWTO Awards Forum di Madrid, Spanyol, pada awal tahun 2016. Banyuwangi memenangkan UNWTO Awards for Excellence and Innovation in Tourism untuk kategori “Inovasi Kebijakan Publik dan Tata Kelola” dengan mengalahkan nominator lainnya dari berbagai negara.⁷

⁷ Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, **Bukan Cuma Wisata Biasa, Kiprah Banyuwangi Membangun Destinasi Branding Hingga Sabet Penghargaan PBB**, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, Banyuwangi, 2017, hlm.9.

Pantai GWD sebagai salah satu wisata baru, yang merupakan sumber pendapatan asli daerah Kabupaten Banyuwangi. Pantai GWD dibangun dengan kerjasama beberapa Dinas yaitu Dinas Kebudayaan dan Pariwisata bertugas mempromosikan, Dinas Perikanan memberdayakan nelayan sekitar, serta Dinas Kebersihan dan Pertamanan membangun taman dan menjaga kebersihan. Adanya kerjasama tersebut dan upaya lainnya membuat Pantai GWD yang dikembangkan berdasarkan Pasal 9 Huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Banyuwangi (selanjutnya disebut Perda RIPK), Strategi pembangunan pariwisata kabupaten adalah: b. meningkatkan kontribusi sektor pariwisata bagi peningkatan pendapatan terutama masyarakat golongan ekonomi menengah kebawah dan pendapatan asli daerah. Berdasarkan hal tersebut, berikut Peneliti sertakan beberapa penelitian sejenis yang berkaitan dengan pendapatan asli daerah pada tabel orisinalitas:

Tabel 1.1 Tabel Orisinalitas Penelitian

No	Identitas	Judul/ Tema	Persamaan	Perbedaan
1.	Yuni Aprilia/ 2017/ Fakultas Hukum/ Universitas Brawijaya	Implementasi Pasal 8 Huruf D Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 Terkait dengan Pengembangan Ekowisata Pulau Merah di Kabupaten Banyuwangi	Persamaannya terletak pada pembahasan yaitu mengenai pengembangan terhadap tempat wisata yang mempunyai tujuan yang sama yaitu untuk meningkatkan pendapatan asli daerah.	Perbedaannya terletak pada pokok bahasannya dimana dalam skripsi penulis membahas mengenai implementasi pasal 8 huruf D Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012, yang terkait dengan pengembangan tempat wisata dan didalam skripsi penulis membahas mengenai pengembangan ekowisata Pulau Merah. Sedangkan

				dalam penelitian ini membahas mengenai upaya pengembangan potensi destinasi wisata baru Pantai Grand Watu Dodol yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah.
2.	R.Hadhitya Rama Fibriawan/ 2017/ Fakultas Hukum/ Universitas Brawijaya	Optimalisasi Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah Pada Sektor Pajak Restoran Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Asli daerah (PAD).	Persamaannya terletak pada pembahasan yaitu mengenai upaya peningkatan pendapatan asli daerah.	Perbedaannya terletak pada pokok bahasannya dimana dalam skripsi penulis membahas mengenai Upaya peningkatan pendapatan asli daerah dari pajak daerah pada sektor pajak restoran, sedangkan dalam penelitian ini penulis membahas mengenai peningkatan pendapatan asli daerah melalui upaya pengembangan destinasi wisata baru Pantai Grand watu Dodol.
3.	Nurcahyo Budiono/ 2015/ Fakultas Hukum/ Universitas Brawijaya	Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah Pacitan Dari Sektor Pariwisata Berdasarkan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 43 Tahun 2007	Persamaannya terletak pada pembahasan yaitu mengenai pengaruh sektor Pariwisata dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah.	Perbedaannya terletak pada pokok bahasannya dimana dalam skripsi penulis membahas mengenai Optimalisasi Pendapatan asli daerah dari sektor Pariwisata di Kabupaten Pacitan, sedangkan dalam penelitian ini penulis membahas mengenai upaya pengembangan destinasi wisata Pantai Grand Watu Dodol untuk meningkatkan pendapatan asli daerah.

Sumber: Diolah berdasarkan data sekunder, 2018

Penelitian ini mempunyai objek penelitian yang sama sebagaimana tercantum dalam tabel orisinalitas penelitian. Objek penelitian tersebut yaitu pendapatan asli daerah. Pembahasan Peneliti fokus pada upaya pengembangan

potensi pariwisata untuk meningkatkan kontribusi sektor pariwisata bagi peningkatan pendapatan terutama masyarakat golongan ekonomi menengah kebawah dan pendapatan asli daerah. Maka dari itu Peneliti membahas mengenai **Pengembangan Potensi Pariwisata Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Berdasarkan Pasal 9 Huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata (Studi di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi).**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengembangan potensi pariwisata untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Banyuwangi?
2. Apa hambatan dan upaya yang dilakukan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi berdasarkan ketentuan Pasal 9 huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Banyuwangi?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan memahami pengembangan potensi pariwisata untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Banyuwangi.
2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan hambatan, serta upaya yang dilakukan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dari pariwisata di Kabupaten Banyuwangi sesuai dengan Pasal 9 huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Banyuwangi.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Memberikan manfaat terhadap ilmu pengetahuan, serta memberikan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan ilmu hukum di Indonesia pada umumnya dan hukum administrasi negara mengenai upaya pengembangan destinasi wisata untuk meningkatkan pendapatan asli daerah pada khususnya. Memberikan kontribusi pemikiran terhadap permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan hukum administrasi negara.

2. Manfaat Praktis

a) Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi khususnya dalam rangka mengembangkan potensi sumber-sumber peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

b) Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan pengetahuan bagi masyarakat mengenai upaya pengembangan potensi destinasi wisata untuk meningkatkan pendapatan asli daerah yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat.

c) Mahasiswa

a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan referensi, bacaan serta ilmu di bidang Hukum Administrasi Negara dan khususnya

- b. terkait upaya pengembangan potensi destinasi wisata untuk meningkatkan pendapatan asli daerah.

E. Sistematika Penelitian

Skripsi ini dibagi menjadi lima bab secara berurutan dan berkaitan satu sama lain. Pokok bahasan masing-masing bab, dijelaskan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab I merupakan bab yang terdiri dari latar belakang yang mendasari dilakukannya penelitian, penelitian terdahulu yang mempunyai kesamaan unsur, pokok permasalahan, tujuan dilakukannya penelitian, manfaat teoritik dan manfaat praktis bagi pihak-pihak yang terkait dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab II berisi tentang kajian teori yang mendalam berkaitan dengan permasalahan yang dibahas serta hasil kajian ilmiah lainnya yang berhubungan dengan penelitian, pendapat para ahli maupun doktrin mengenai permasalahan, sehingga dapat memahami konsep permasalahan dengan baik.

BAB III : METODE PENELITIAN

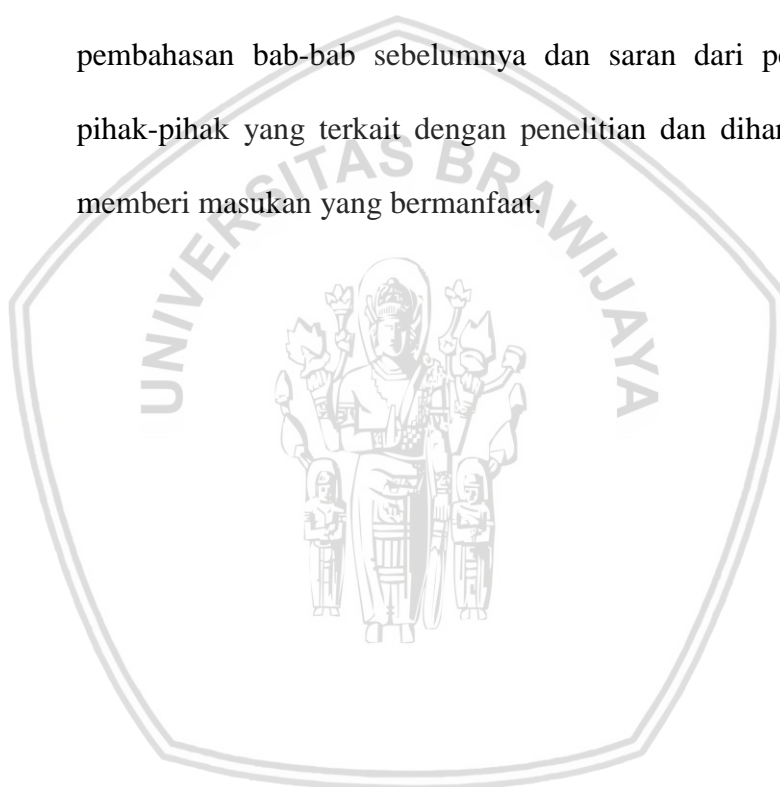
Bab III berisi tentang cara penelitian dilakukan terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis dan sumber data, metode perolehan data, data primer, data sekunder, serta metode analisis yang digunakan.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab IV berisi tentang uraian dan rincian penelitian serta hasil penelitian secara detail. Penelitian dan pembahasan diuraikan berdasarkan rumusan masalah sehingga didapatkan pemahaman secara menyeluruh terhadap hasil penelitian.

BAB V :PENUTUP

Bab V merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dari hasil pembahasan bab-bab sebelumnya dan saran dari penulis untuk pihak-pihak yang terkait dengan penelitian dan diharapkan dapat memberi masukan yang bermanfaat.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Otonomi Daerah

Menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU Pemda), Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

Otonomi Daerah menurut Pasal 1 angka 6 UU Pemda adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Pasal 1 angka 12 UU Pemda Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Esensi dari pemerintahan desentralisasi adalah otonomi daerah. Otonomi daerah erat hubungannya dalam kebijakan desentralisasi pada

penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu Negara. Dalam otonomi, hubungan kewenangan antara pusat dan daerah bertalian dengan cara pembagian urusan penyelenggaraan pemerintahan atau cara menentukan urusan rumah tangga daerah.¹

Hubungan antara pusat dan daerah dalam sistem Negara kesatuan melahirkan konsep sentralisasi dan desentralisasi. Perspektif segi wewenang, desentraalisasi memberikan wewenang kepada pemerintahan daerah untuk menangani urusan-urusan tertentu sebagai urusan daerahnya sendiri, sehingga beban pemerintah pusat akan berkurang. Dalam perspektif lebih luas, penyerahan fungsi dan wewenang atau desentralisasi devolusi, yaitu:²

- a. Adanya penyerahan wewenang untuk melaksanakan fungsi pemerintahan tertentu dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom;
- b. Fungsi pemerintahan yang diserahkan kepada daerah dapat dirinci atau merupakan fungsi yang tersisa (*residual function*);
- c. Penerima wewenang adalah daerah otonom;
- d. Daerah wewenang mengatur dan mengurus kepentingan-kepentingan yang bersifat lokal.

Secara garis besar dapat dikatakan bahwa, dengan hadirnya satuan pemerintahan teritorial yang lebih kecil dalam wilayah negara kesatuan Indonesia yaitu Pemerintah Daerah, yang didalamnya mempunyai

¹Ahmad Fikri Hadin, **Eksistensi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan di Era Otonomi Daerah**, Genta Press, Yogyakarta, 2013, hlm. 18.

²Ahmad Fikri Hadin, *Ibid.*, hlm. 20.

kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya, dapat diperjelas dengan alasan sebagai berikut:³

- a. Sebagai perwujudan fungsi dan peran negara modern, yang lebih menekankan pada upaya memajukan kesejahteraan umum (*welfare state*). Peran tersebut membawa konsekuensi pada semakin luasnya campur tangan negara dalam mengatur dan mengurus aktivitas warga negara demi pencapaian tujuan negara. Fakta kemajemukan masyarakat Indonesia, baik dari segi teritorial, suku golongan, agama, membawa konsekuensi kepada kompleksnya persoalan-persoalan kemasyarakatan yang harus dipecahkan oleh negara. Kenyataan ini mendorong negara untuk membuka jalur partisipasi masyarakat untuk ikut memikirkan dan menyelesaikan persoalan tersebut, salah satunya dengan memberikan kesempatan kepada satuan pemerintah teritorial yang terdekat dengan masyarakat, yaitu pemerintah daerah untuk terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Pemerintah Daerah diberikan kewenangan-kewenangan tertentu untuk mengatur dan mengurus aktivitas pemerintahan dan pembangunan di wilayahnya;
- b. Hadirnya otonomi daerah dapat pula dilihat dari perspektif politik. Negara sebagai organisasi kekuasaan, yang didalamnya terdapat lingkungan-lingkungan kekuasaan, baik pada tingkat supra struktur maupun infra struktur, yang cenderung menyalahgunakan kekuasaan. Untuk menghindari hal tersebut, diperlukan pemencaran kekuasaan (*dispersed of power*). Pemencaran kekuasaan negara dalam rangka

³Lukman Hakim, **Filosofi Kewenangan Organ dan Lembaga Daerah**, Setara Press, Malang, 2012, hlm.33-34.

penyelenggaraan pemerintahan dilakukan dengan membentuk satuan-satuan teritorial yang lebih kecil dan dekat dengan rakyat. Satuan teritorial tersebut dikenal dengan sebutan daerah besar dan kecil (sebagaimana maksud Pasal 18 UUDNRI 1945).

B. Keuangan Daerah

Presiden selaku kepala pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara yang merupakan salah satu bagian dari kekuasaan pemerintahan. Dalam hal pengelolaan keuangan daerah, maka kekuasaan tersebut oleh presiden diserahkan kepada kepala daerah (gubernur, bupati/walikota) selaku kepala pemerintahan daerah untuk mengelola keuangan daerahnya dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Dengan model atau bentuk kelembagaan berupa penyerahan kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dari presiden tersebut mengisyaratkan adanya hubungan keuangan daerah dengan pusat.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, didukung dana dari dan atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah, sedangkan yang menjadi kewenangan pemerintah, didukung dana dari dan atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara. Di bidang penyelenggaraan daerah, kepala daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah. Dalam melaksanakan kekuasaan tersebut, kepala daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya berupa perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, serta pengawasan keuangan daerah kepada pejabat perangkat daerah. Pelimpahan sebagian atau seluruh kekuasaan ini, didasarkan atas

prinsip pemisahan kewenangan antara yang memerintahkan, menguji, dan yang menerima/mengeluarkan uang.⁴

Menurut UU Pemda, Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Hak dan Kewajiban daerah tersebut perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah merupakan subsistem dari sistem pengelolaan Keuangan Negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Pengelolaan keuangan daerah juga harus dilakukan dengan cara yang baik dan bijak agar keuangan daerah tersebut bisa menjadi efisien penggunaannya yang sesuai dengan kebutuhan daerah.

C. Pendapatan Asli Daerah

Pengertian pendapatan asli daerah berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah adalah “Pendapatan asli daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Pasal 285 angka 1 UU Pemda, menyebutkan bahwa sumber pendapatan asli daerah terdiri atas:

- a. Pendapatan asli Daerah

⁴Siswanto Sunarno, Op.Cit., hlm. 77-78

1) Pajak daerah;

Penerimaan Negara ada beberapa sumber terdiri dari pajak, kekayaan alam, bea dan cukai, retribusi, iuran, sumbangan atau hibah, pinjaman, Penerimaan Pemerintah (*dividen*) dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Surat Utang Negara. Penerimaan negara ini akan membiayai kepentingan negara yang pada akhirnya akan mencakup kepentingan masyarakat bahkan individu misalnya jaminan kesehatan masyarakat, biaya pendidikan gratis, dan beasiswa. Itulah sebabnya fungsi pajak sekarang berbeda dengan fungsi pajak sebelumnya, pada awalnya pajak yang dipungut hanya untuk kepentingan penguasa sedangkan sekarang pajak yang dipungut dari rakyat dipruntukan atau dikembalikan kepada rakyat dalam bentuk lain.

Pajak merupakan pungutan wajib yang di pungut secara teratur dan dilindungi peraturan misalnya undang-undang oleh pemegang otoritas kekuasaan dalam satu wilayah dalam jangka waktu tertentu dan penggunaannya dikendalikan oleh otoritas kekuasaan tanpa membuat pertanggungjawaban secara langsung kepada pemberi pajak.⁵

Pajak menjadi sumber keuangan pokok bagi daerah-daerah disamping retribusi daerah. Dengan demikian ciri-ciri yang menyertai pajak daerah dapat diikhtisarkan seperti berikut:

- a) Pajak daerah berasal dan pajak negara yang diserahkan kepada daerah sebagai pajak daerah;
- b) Penyerahan dilakukan berdasarkan undang-undang;

⁵Pandiangan, *ibid.*,

- c) Pajak daerah dipungut oleh daerah berdasarkan kekuatan undang-undang dan/atau peraturan hukum Lainnya;
- d) Hasil pungutan pajak daerah dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan urusan-urusan rumah tangga daerah atau untuk membiayai perigeluaran daerah sebagai badan hukum publik.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (selanjutnya disebut UU PDRD), Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Jenis Pajak dibedakan menjadi 2 bagian menurut UU PDRD yaitu: yang Pertama Jenis Pajak Provinsi yang terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, serta Pajak Rokok. Sedangkan yang kedua adalah Jenis Pajak Kabupaten/Kota yang terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Daerah dilarang memungut pajak selain jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam UU PDRD tersebut, dan Jenis Pajak tersebut dapat

tidak dipungut oleh Daerah apabila potensinya kurang memadai dan/atau disesuaikan dengan kebijakan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

2) Retribusi daerah;

Di samping pajak daerah, sumber pendapatan daerah dapat diperoleh melalui retribusi. Menurut UU PDRD, retribusi dibagi menjadi tiga golongan, yaitu :

a) Retribusi Jasa Umum.

Retribusi Jasa Umum yang dimaksud merupakan kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

b) Retribusi Jasa Usaha

Jasa yang bersangkutan adalah jasa yang bersifat komersial yang seyogyanya disediakan oleh sektor swasta tetapi belum memadai atau terdapatnya harta yang dimiliki atau dikuasai Daerah yang belum dimanfaatkan secara penuh oleh Pemerintah Daerah

c) Retribusi Perijinan tertentu

Perijinan tersebut termasuk kewenangan pemerintah yang diserahkan kepada Daerah dalam rangka asas desentralisasi.

3) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan antara lain bagian laba dari Badan Usaha Milik Daerah, dana hasil kerjasama dengan pihak ketiga.

4) lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah

Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah selain pajak, retribusi dan perusahaan daerah maka daerah berhak mendapatkan sumber daerah itu sendiri. Lain-lain usaha daerah yang sah merupakan usaha daerah (bukan usaha perusahaan daerah) dapat dilakukan oleh suatu aparat Pemerintah Daerah (dinas) yang dalam kegiatannya menghasilkan suatu barang atau jasa yang dapat dipergunakan oleh masyarakat dengan ganti rugi. Usaha daerah sebagai sumber pendapatan daerah harus disetorkan kepada kas daerah dan diatur dalam peraturan daerah. Dalam pelaksanaan Otonomi Daerah, Kabupaten/ kota melakukan berbagai upaya terobosan dalam peningkatan perolehan Pendapatan Asli Daerah, sebab faktor dana sangat menentukan lancar tidaknya suatu pemerintah daerah. Pelayanan kepada masyarakat akan terlambat akibat terbatasnya kemampuan dalam bidang pendanaan. Dengan terbatasnya sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak banyak yang dapat dilakukan dalam memberikan pelayanan maupun kemudahan bagi masyarakat.

b. Pendapatan transfer;

Pendapatan transfer meliputi, transfer Pemerintah Pusat, yang terdiri atas dana perimbangan, dana otonomi khusus, dana keistimewaan, dan dana Desa. Serta Transfer antar-Daerah terdiri atas pendapatan bagi hasil dan bantuan keuangan.

c. Lain-lain pendapatan Daerah yang sah.

Lain-lain pendapatan Daerah yang sah merupakan Penerimaan Daerah di luar pajak daerah dan retribusi daerah seperti jasa giro dan hasil

penjualan aset Daerah, hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari ketentuan Pasal 285 angka 1 UU Pemda tersebut di atas, maka pendapatan daerah dapat dibedakan dalam dua jenis yaitu : Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Non Asli Daerah.

Sampai saat ini yang termasuk Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang berasal dari daerah itu sendiri dan didapat melalui pajak daerah, retribusi daerah, Badan Usaha Milik Daerah, dan hasil kerjasama dengan pihak ketiga.

D. Pariwisata

Pengertian menurut Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan:

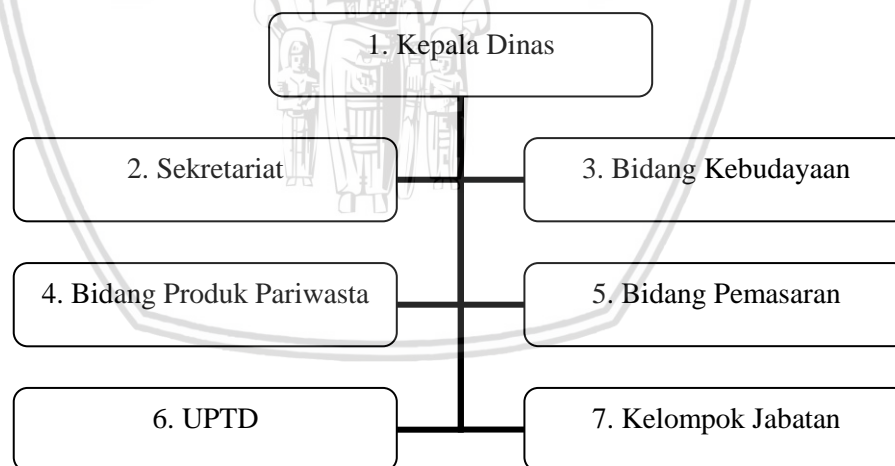
- a. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
- b. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
- c. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
- d. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.
- e. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
- f. Daerah tujuan pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata,

- aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
- g. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
 - h. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
 - i. Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
 - j. Kawasan Strategis Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.

E. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi

a. Susunan organisasi⁶

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, terdiri dari :



b. Kedudukan, tugas, dan fungsi

- 1) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang kebudayaan dan bidang pariwisata yang menjadi kewenangan daerah;

⁶ Kabupaten Banyuwangi. <https://www.banyuwangikab.go.id/skpd/unit/21601/dinas-kebudayaan-dan-pariwisata.html> (diakses pada tanggal 8 Mei 2018, Pukul 20.00)

- 2) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagaimana dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- 3) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagaimana mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dibidang kebudayaan dan dibidang pariwisata yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten;
- 4) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam melaksanakan tugas sebagaimana menyelenggarakan fungsi :
 - a) Perumusan kebijakan teknis dibidang kebudayaan dan pariwisata;
 - b) Pelaksanaan kebijakan teknis dibidang kebudayaan dan pariwisata;
 - c) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang kebudayaan dan pariwisata;
 - d) Pelaksanaan administrasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
 - e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah Yuridis Empiris (*Empiric Legal Research*) karena akan meneliti tentang bagaimana upaya yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi dalam mengembangkan potensi Destinasi wisata Pantai Grand Watu Dodol serta hambatan atau kendala dalam upaya pengembangan tersebut berdasarkan Pasal 9 huruf b Perda RIPK. Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Di samping itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap faktor hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.¹

B. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan penulis adalah metode pendekatan yuridis sosiologis. Pada tingkat perkembangan peradaban ilmu (hukum) seperti sekarang ini, mulai berkembang dengan pesatnya suatu cabang (disiplin) hukum yang secara sistematis dan intensif melakukan kajian terhadap aspek-aspek sosial dari hukum, yang kemudian lebih dikenal dengan studi hukum dan masyarakat. Di satu sisi, perkembangan yang demikian lebih terlatar belakangi oleh suatu kebutuhan dimana hukum lebih dipandang dapat menjalankan fungsi-fungsinya sebagai “perekayasa sosial”, yang dengan

¹ Soerjono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, UI Press, Jakarta, 1981, hlm. 43.

demikian ia membutuhkan kehadiran ilmu-ilmu dasarnya seperti antropologi, psikologi, dan khususnya sosiologi. Dari sisi yang lain secara historis, pemanfaatan hukum untuk lebih efektif menyelesaikan masalah-masalah sosial dikembangkan dalam kerangka ajaran *sociological jurisprudence*, yang dalam perkembangannya dalam rangka kajian *sociology of law* dimanfaatkan untuk menganalisis dan memberikan jawaban untuk mengefektifkan bekerjanya seluruh struktur institusional hukum.²

C. Lokasi Penelitian

Penulis melakukan penelitian di Kabupaten Banyuwangi, berdasarkan permasalahan yang di tulis oleh penulis, Kabupaten Banyuwangi merupakan salah satu daerah yang memiliki banyak destinasi wisata, dan banyak sekali potensi tempat wisata baru yang dapat tumbuh dan berkembang di kabupaten Banyuwangi. Dengan banyaknya destinasi wisata dan potensi wisata lainnya yang ada di Kabupaten Banyuwangi, serta Kabupaten Banyuwangi telah meraih penghargaan dari Badan Pariwisata Perserikatan Bangsa-Bangsa (*The United Nations World Tourism Organization/UNWTO*) dalam ajang 12thUNWTO Awards Forum di Madrid, Spanyol, pada awal tahun 2016. Banyuwangi memenangkan UNWTO Awards for Excellence and Innovation in Tourism untuk kategori “Inovasi Kebijakan Publik dan Tata Kelola” dengan mengalahkan nominator lainnya dari berbagai negara, maka penulis menentukan lokasi penelitian di Kabupaten Banyuwangi. Khususnya di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi yang beralamat di Jl. Jenderal Ahmad Yani No.74, Taman Baru, Kec. Banyuwangi, Kabupaten

²Bambang Sunggono, **Metodologi Penelitian Hukum**, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm.72-73.

Banyuwangi, Jawa Timur 68416, yang merupakan tempat yang digunakan penulis untuk mengumpulkan data terkait upaya pengembangan suatu destinasi wisata yang dalam hal ini merupakan wewenang Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Fokus utama pada destinasi Wisata Pantai Grand Watu Dodol, merupakan tempat wisata yang digunakan oleh penulis sebagai lokasi penelitian yang akan menganalisis upaya pengembangan potensi dari destinasi wisata Pantai Grand Watu Dodol. Penulis memilih Pantai Grand Watu Dodol karena destinasi wisata yang masih baru dan sedang dikembangkan oleh pemerintah kabupaten Banyuwangi.

D. Jenis Data

a. Data Primer

Data yang diperoleh dari Penulis yang langsung terjun ke obyek penelitian untuk mencari data, informasi maupun fakta yang berkaitan dengan upaya meningkatkan PAD melalui destinasi wisata Pantai Grand Watu Dodol di Kabupaten Banyuwangi.

b. Data Sekunder

Data yang di peroleh dengan menggunakan studi kepustakaan melalui buku, jurnal, data atau laporan yang berhubungan dengan pembahasan yang menjadi permasalahan penelitian, serta Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Banyuwangi.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan langkah yang sangat penting dalam rangka penelitian. Pada penelitian ini dalam proses pengumpulan data akan digunakan metode wawancara, dan dokumentasi

a. Wawancara (*Interview*)

Dalam penelitian ini teknik wawancara digunakan sebagai cara untuk mengumpulkan data. Pengertian Wawancara adalah proses tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung. Percakapan ini dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan. Penggunaan metode wawancara dalam penelitian ini ditujukan untuk mengungkapkan data tentang Bagaimana potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui destinasi wisata Pantai Grand Watu Dodol.

b. Teknik Kepustakaan

Teknik pengumpulan data dengan mencatat dan memanfaatkan data yang ada pada instansi tersebut dapat berupa dokumen, bahan laporan, yang terkait dengan masalah penelitian agar mendapat informasi yang diperlukan yang dapat mendukung penelitian.

F. Populasi dan Sampel

- a. Populasi adalah keseluruhan obyek atau subjek penelitian dengan ciri-ciri yang sama. Dalam penelitian ini, populasinya adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi sebagai lembaga yang berwenang terhadap penyelenggaraan pariwisata.

- b. Sampel adalah sebagian dari jumlah atau karakteristik yang dimiliki populasi. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan prosedur Purposive Sampling, yaitu suatu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu atau seleksi khusus. Sampel dari penelitian ini adalah Kepala Bidang Produk Pariwisata dan Kasi Optimalisasi Pendapatan Daerah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi.
- c. Responden dalam penelitian ini adalah masyarakat yang bekerja dan berjualan di destinasi wisata Pantai Grand Watu Dodol.

G. Teknik Analisis Data

Setelah keseluruhan data yang diperlukan telah tersedia, maka data tersebut akan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analitis yaitu dengan cara memaparkan data-data yang telah diperoleh dari penelitian secara sistematis kemudian dianalisis untuk memperoleh suatu kesimpulan.

H. Definisi Operasional

1. Pengembangan

Pengembangan dalam pengertian adalah sesuatu yang belum ada menjadi ada atau mengembangkan sesuatu yang sudah ada. Dalam konteks pembangunan pariwisata misalnya pengembangan produk wisata (destinasi wisata), pengembangan strategi pemasaran, dan lain-lain.

2. Potensi Pariwisata

Kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan dari berbagai macam kegiatan wisata yang didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, pemerintah dan

pemerintah daerah dalam hal ini dikelola oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi, dan berkaitan dengan penerimaan daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah.

3. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang bersumber dan dipungut sendiri oleh daerah berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.



BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Tentang Kabupaten Banyuwangi¹

Gambar 1



Lambang Kabupaten Banyuwangi

Makna Lambang Kabupaten Banyuwangi adalah sebagai berikut:

Makna Bentuk Lambang

- a. Daun Lambang Berbentuk Perisai, Ditengah-tengah lambang berdiri tegak lurus garis berwarna putih membelah dasar lambang secara simetris menjadi dua bagian sebelah kiri warna hitam, bagian sebelah kanan warna hijau.
- b. Dalam Lambang Tertulis Peta Kabupaten Banyuwangi, Dengan dibatasi oleh gambar padi berbutir 17 sebelah kanan dan 8 buah kapas sebelah kiri. Selat Bali dan Samudra Indonesia serta Kawah Ijen dilukiskan dengan warna biru.
- c. Di Bagian Atas Tengah, yakni di atas Peta Kabupaten Banyuwangi terlukiskan sebuah bintang bersudut lima dengan warna kuning

¹ banyuwangikab.go.id ((diakses pada 31 Mei 2018, Pukul 14.00))

emas melekat pada garis tegak lurus tersebut di atas. Bintang tersebut bersinar lima.

- d. Pita Kuning, menghiasi bagian bawah dengan berisikan tulisan B A N Y U W A N G I, dengan warna merah.
- e. Pita Putih Sebagai Dasar, pada bagian bawah di luar daun lambang dengan berisikan tulisan "SATYA BHAKTI PRAJA MUKTI", berwarna hitam, yang menyatu garis tepi perisai.

Makna Bagian-Bagian Lambang

- a. Daun Lambang Berbentuk Perisai adalah lambang keamanan dan ketentraman serta kejujuran melambangkan dasar dan keinginan hidup rakyat Kabupaten Banyuwangi.
- b. Bintang Dengan Warna Kuning Emas adalah lambang Ketuhanan Yang Maha Esa, bersudut lima dan bersinar lima dengan garis tegak berarti berdiri tegak atas dasar Pancasila yang merupakan dasar dan falsafah Negara yang senantiasa dijunjung tinggi serta selalu menyinari jiwa rakyat Kabupaten Banyuwangi. Bintang bersinar lima menyinari Peta Kabupaten Banyuwangi, padi dan kapas.
- c. Padi Dan Kapas lambang sandang pangan yang menjadi kebutuhan pokok rakyat sehari-hari, gambar padi berbutir 17 buah dan kapas 8 buah melambangkan saat-saat kramat bagi Bangsa Indonesia yaitu tanggal 17 Agustus 1945.
- d. Peta Kabupaten Banyuwangi yang terdapat banyak sungai-sungai dilukiskan warna kuning dan hijau serta di lingkungan Selat Bali

dan Samudra Indonesia melambangkan sumber kemakmuran daerah.

- e. Pita Berisikan Tulisan Banyuwangi menunjukkan Daerah Kabupaten Banyuwangi.
- f. Pita Dasar Dengan Warna Putih berisikan tulisan SATYA BHAKTI PRAJA MUKTI menunjukkan makna selalu mengabdikan kepada kebenaran demi kesejahteraan dan kebahagiaan rakyat.

Kabupaten Banyuwangi merupakan daerah otonom yang memiliki hak wewenang, serta kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia, berdasarkan Pasal 1 angka 6 UU Pemda. Adanya penyerahan wewenang dari Pemerintah pusat kepada daerah otonom, maka daerah otonom dapat melaksanakan fungsi pemerintahan tertentu serta kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

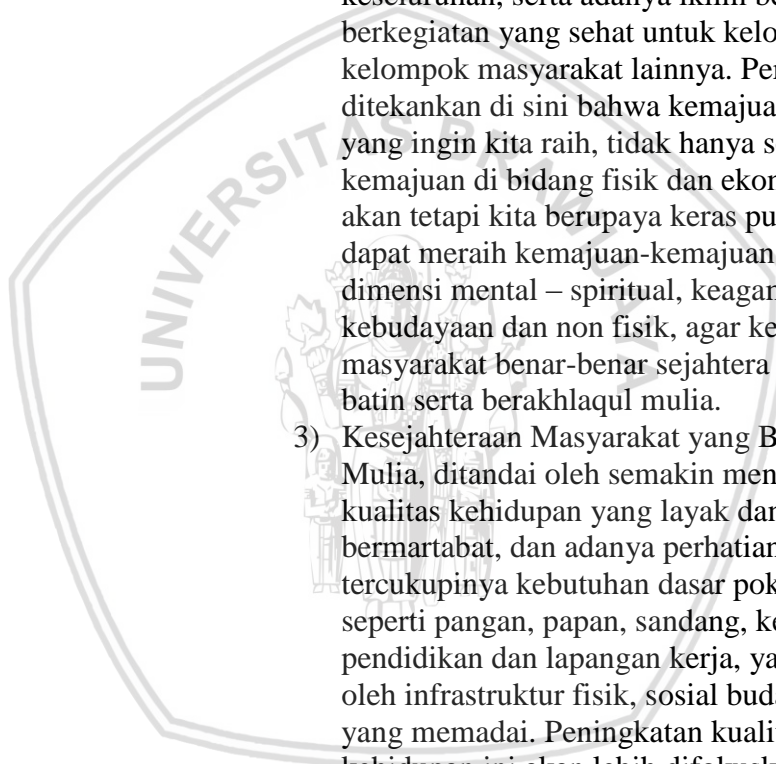
a. Visi dan Misi Kabupaten Banyuwangi sebagai berikut:

Visi : ‘Terwujudnya Masyarakat Banyuwangi Yang Mandiri, Sejahtera Dan Berakhlak Mulia Melalui Peningkatan Perekonomian Dan Kualitas Sumber Daya Manusia’

Visi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Kemandirian Daerah adalah kemampuan riil atau nyata pemerintah daerah dan masyarakatnya dalam mengatur dan mengurus kepentingan daerah/rumah tangganya sendiri menurut prakarsa dan aspirasi masyarakatnya, termasuk di dalamnya upaya yang sungguh-sungguh agar secara setahap demi setahap bisa mengurangi ketergantungan terhadap pihak-pihak lain (luar) tanpa kehilangan adanya kerjasama dengan daerahdaerah lain yang saling menguntungkan.

- 2) Kesejahteraan Masyarakat yang Berakhlaq Mulia, ditandai oleh semakin meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat, dan adanya perhatian utama pada tercukupinya kebutuhan dasar pokok manusia, seperti pangan, papan, sandang, kesehatan, pendidikan dan lapangan kerja, yang didukung oleh infrastruktur fisik, sosial budaya ekonomi yang memadai. Peningkatan kualitas kehidupan ini akan lebih difokuskan pada upaya pengentasan masyarakat miskin sehingga secara simultan dapat meningkatkankesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, serta adanya iklim berusaha dan berkegiatan yang sehat untuk kelompok-kelompok masyarakat lainnya. Perlu ditekankan di sini bahwa kemajuan-kemajuan yang ingin kita raih, tidak hanya sekedar kemajuan di bidang fisik dan ekonomi saja, akan tetapi kita berupaya keras pula untuk dapat meraih kemajuan-kemajuan pada dimensi mental – spiritual, keagamaan, kebudayaan dan non fisik, agar kehidupan masyarakat benar-benar sejahtera lahir dan batin serta berakhlaqul mulia.
- 3) Kesejahteraan Masyarakat yang Berakhlaq Mulia, ditandai oleh semakin meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat, dan adanya perhatian utama pada tercukupinya kebutuhan dasar pokok manusia, seperti pangan, papan, sandang, kesehatan, pendidikan dan lapangan kerja, yang didukung oleh infrastruktur fisik, sosial budaya ekonomi yang memadai. Peningkatan kualitas kehidupan ini akan lebih difokuskan pada upaya pengentasan masyarakat miskin sehingga secara simultan dapat meningkatkankesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, serta adanya iklim berusaha dan berkegiatan yang sehat untuk kelompok-kelompok masyarakat lainnya. Perlu ditekankan di sini bahwa kemajuan-kemajuan yang ingin kita raih, tidak hanya sekedar kemajuan di bidang fisik dan ekonomi saja, akan tetapi kita berupaya keras pula untuk dapat meraih kemajuan-kemajuan pada dimensi mental – spiritual, keagamaan, kebudayaan dan non fisik, agar kehidupan



masyarakat benar-benar sejahtera lahir dan batin serta berakhlakul mulia.

- 4) Untuk mempercepat program-program tersebut perlu ditingkatkan pelayanan publik melalui optimalisasi kinerja instansi Pemerintah Daerah yang efektif, terpadu dan berkesinambungan.

Misi :

- 1) mewujudkan pemerintahan yang efektif, bersih dan demokratis melalui penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, aspiratif, partisipatif dan transparan;
- 2) meningkatkan kebersamaan dan kerjasama antara pemerintah, pelaku usaha dan kelompok-kelompok masyarakat untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- 3) membangun kemandirian ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dengan mengoptimalkan sumberdaya daerah yang berpijak pada pemberdayaan masyarakat, berkelanjutan, dan aspek kelestarian lingkungan;
- 4) meningkatkan sumber-sumber pendanaan dan ketepatan alokasi investasi pembangunan melalui penciptaan iklim yang kondusif untuk pengembangan usaha dan penciptaan lapangan kerja;
- 5) mengoptimalkan ketepatan alokasi dan distribusi sumber-sumber daerah, khususnya APBD, untuk peningkatan kesejahteraan rakyat;
- 6) meningkatkan kecerdasan dan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang beriman dan bertaqwa kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa;
- 7) meningkatkan kualitas pelayanan bidang kesehatan, pendidikan dan sosial dasar lainnya dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kearifan local;
- 8) meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana publik dengan memperhatikan kelestarian lingkungan; .
- 9) mendorong terciptanya ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan bernegara, berbangsa dan bermasyarakat melalui pembuatan peraturan daerah, penegakan

peraturan dan pelaksanaan hukum yang berkeadilan.

b. Data Geografis Kabupaten Banyuwangi

1) Batas wilayah

Sebelah utara : berbatasan dengan Kabupaten Situbondo

Sebelah timur : berbatasan dengan selat bali

Sebelah selatan : berbatasan dengan Samudera Indonesia

Sebelah barat : berbatasan dengan Kabupaten Jember dan Bondowoso.

2) Batas koordinat

7° 43' — 8° 46' Lintang Selatan

113° 53' — 114° 38' Bujur Timur.

3) Luas wilayah 5.782,50 km²

Terdiri atas Area kawasan hutan 183.396,34 ha, persawahan 66.152 ha, perkebunan dengan luas 82.143,63 ha, pemukiman dengan luas 127.454,22 ha. Sisanya dipergunakan sebagai jalan, ladang, dan lain-lain.

4) Panjang garis pantai 175,8 km,

5) jumlah pulau 10 buah.

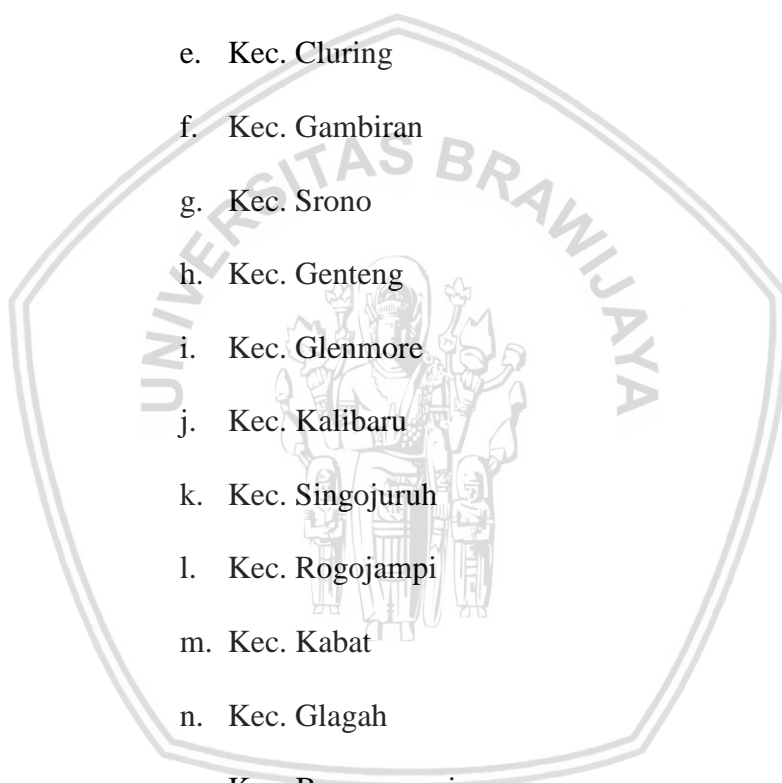
6) Wilayah Pemerintahan

Kabupaten Banyuwangi dengan luas wilayah 5.782,50 km², pada tahun 2017 terdiri atas 25 Kecamatan, 28 Kelurahan dan 189 desa, 87 Lingkungan dan 751 Dusun, 2.839 Rukun Warga (RW) dan 10.569 Rukun Tetangga (RT). Tahun 2017 penduduk Kabupaten Banyuwangi sebanyak

1.692.324 jiwa, terdiri dari 841.899 jiwa perempuan dan 850.425 jiwa laki-laki, dengan sex ratio 99.99%.

7) Kecamatan di Kabupaten Banyuwangi

- a. Kec. Pesanggaran
- b. Kec. Bangorejo, Purwoharjo
- c. Kec. Tegaldlimo
- d. Kec. Muncar
- e. Kec. Cluring
- f. Kec. Gambiran
- g. Kec. Srono
- h. Kec. Genteng
- i. Kec. Glenmore
- j. Kec. Kalibaru
- k. Kec. Singojuruh
- l. Kec. Rogojampi
- m. Kec. Kabat
- n. Kec. Glagah
- o. Kec. Banyuwangi
- p. Kec. Giri
- q. Kec. Wongsorjo
- r. Kec. Songgon
- s. Kec. Sempu
- t. Kec. Kalipuro
- u. Kec. Siliragung



- v. Kec. Tegalsari
- w. Kec. Licin Kecamatan
- x. Kec. Blimbingsari.

- 8) Letak geografis di ujung timur Pulau Jawa, wilayah daratan terdiri atas daratan tinggi berupa pegunungan yang menghasilkan produk perkebunan, dan daratan rendah dengan berbagai potensi produk hasil pertanian serta daerah sekitar garis pantai yang membujur dari arah utara hingga ke arah selatan menghasilkan berbagai biota laut.
- 9) Kabupaten Banyuwangi merupakan daerah produksi tanaman perkebunan dan kehutanan, serta memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai daerah penghasil ternak yang merupakan sumber pertumbuhan baru perekonomian rakyat.

2. Gambaran Umum Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi

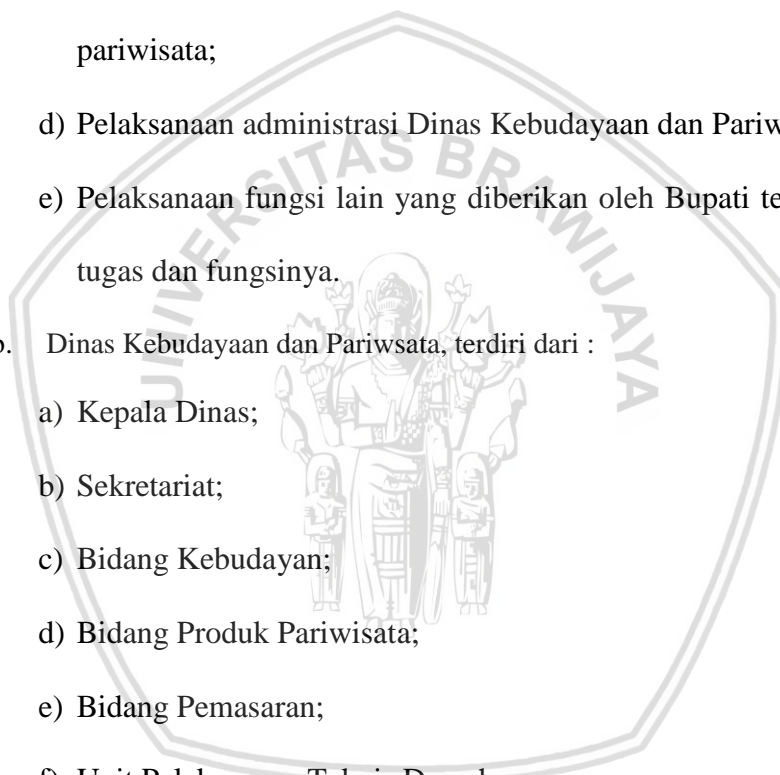
a. Kedudukan, tugas, dan fungsi

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang kebudayaan dan bidang pariwisata yang menjadi kewenangan daerah. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagaimana dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagaimana mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dibidang

kebudayaan dan dibidang pariwisata yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam melaksanakan tugas sebagaimana menyelenggarakan fungsi :

- a) Perumusan kebijakan teknis dibidang kebudayaan dan pariwisata;
 - b) Pelaksanaan kebijakan teknis dibidang kebudayaan dan pariwisata;
 - c) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang kebudayaan dan pariwisata;
 - d) Pelaksanaan administrasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
 - e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
- b. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, terdiri dari :
- a) Kepala Dinas;
 - b) Sekretariat;
 - c) Bidang Kebudayaan;
 - d) Bidang Produk Pariwisata;
 - e) Bidang Pemasaran;
 - f) Unit Pelaksanaan Teknis Daerah;
 - g) Kelompok Jabatan.



B. Pengembangan Potensi Pariwisata Guna Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banyuwangi

Kabupaten Banyuwangi mempunyai potensi yang cukup besar di bidang pariwisata untuk dikembangkan, dengan terdapatnya berbagai macam destinasi wisata. Beberapa destinasi yang ada di Kabupaten Banyuwangi adalah sebagai berikut:

- a. pantai wedi ireng;
- b. padang rumput sadengan;
- c. pantai boom;
- d. pantai cemara;
- e. bangsring underwater
- f. pulau tabuhan;
- g. pantai plengkung;
- h. pantai pulau merah;
- i. teluk hijau;
- j. pantai sukamade;
- k. kawah ijen;
- l. pulau santen, dan sebagainya.

Potensi pariwisata jika dikembangkan, akan menghasilkan pendapatan untuk keuangan daerah. Sehingga pendapatan asli daerah dapat meningkat dan mempermudah penyelenggaraan pemerintah daerah.

Destinasi wisata yang ada di Kabupaten Banyuwangi salah satunya wisata Pantai Grand Watu Dodol (GWD). Tempat wisata pantai baru ini memiliki berbagai fasilitas seperti tempat makan, penyewaan perahu, serta

snorkeling dari Pantai GWD, Pulau Menjangan hingga Pulau Tabuhan. Kawasan Wisata Pantai GWD menjadi pintu masuk ke Kabupaten Banyuwangi apabila dari arah wilayah Kabupaten Situbondo. Nama Watu Dodol sendiri merujuk kepada sebuah batu besar setinggi 6 meter yang berlokasi tepat di antara kedua ruas jalan raya di depan destinasi wisata Pantai GWD. Lokasi kawasan wisata ini terletak di Desa Ketapang, Kecamatan Kalipuro, arah utara sekitar 5 kilometer dari Pelabuhan Ketapang, Kabupaten Banyuwangi.

Pariwisata yang ada di Kabupaten Banyuwangi dikelola oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, bidang pariwisata. Melalui bidang Pariwisata Kabupaten Banyuwangi, pemerintah melakukan pengembangan terhadap potensi pariwisata yang terdapat di Kabupaten Banyuwangi, dengan hal-hal berikut:²

a. Memperbanyak obyek wisata

Kabupaten Banyuwangi memperbanyak obyek wisata dengan mengembangkan potensi pariwisata yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Banyaknya destinasi wisata baru yang di buka dan dikembangkan, maka pendapatannya akan berbeda dengan daerah yang destinasi wisatanya sedikit, akan lebih banyak pula pendapatan yang diperoleh kabupaten dari sektor pariwisata yang memiliki banyak destinasi wisata.

b. Meningkatkan pelayanan pada destinasi-destinasi pariwisata.

Hal ini dilakukan untuk menarik minat pengunjung dengan melakukan pelayanan yang baik serta membuat wahana permainan baru, contohnya

²Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Produk Pariwisata (Bapak Marhen) dan Kasi Optimalisasi Pendapatan Daerah (Ibu Nur Soetjiati) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi, pada 23 Mei 2018.

di Pantai Pulau Merah ada pelatihan *surfing* (selancar), di Bangsring Underwater ada penyewaan perahu ke rumah apung, pengunjung juga dapat menyewa peralatan *snorkeling*. Di Pantai Grand Watu Dodol, pengunjung dapat menikmati wahana yang telah ada, serta mencoba hal baru yang ada di GWD yaitu ATV.

c. Menggunakan Aplikasi *E-ticketing* (tiket elektronik)

Aplikasi ini digunakan untuk menghapuskan kecurangan di lapangan oleh pengelola destinasi wisata. Sistem bekerjanya aplikasi yaitu, tiket masuk dan tiket parkir yang dikeluarkan dalam bentuk cetak bukti pembayaran dan setiap pencetakan langsung tercatat di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi. Aplikasi *e-ticketing* ini diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 81 Tahun 2016 Tentang Pembayaran dan Pelaporan Pajak Parkir, Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan Secara Elektronik.

d. Promosi

Berbagai promosi dilakukan agar menarik minat pengunjung, mulai dari televisi, radio lokal kabupaten maupun provinsi dan nasional, media cetak, koran, baleho, maskapai penerbangan, serta media sosial seperti *instagram*, *facebook*, *twitter*, dan *youtube*. Kabupaten Banyuwangi menjadi satu satunya Kabupaten di Indonesia yang berhasil meraih penghargaan *Indonesia Content Marketing Award (ICMA) 2018*. Dalam hal ini, Banyuwangi meraih juara 3 kategori *The Best Content Marketing Implementation in Government Category in Indonesia 2018*, berjajar

bersama Kementrian Keuangan Republik Indonesia yang meraih juara 1 dan Pemerintah Provinsi Jakarta yang berhasil meraih juara ke 2.³

1. Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banyuwangi

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh daerah, bersumber dan dipungut sendiri oleh daerah berdasarkan peraturan daerah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Sumber pendapatan asli daerah terdiri atas pendapatan dari pajak daerah, retribusi daerah (retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perjanjian tertentu), pendapatan transfer (transfer pemerintah pusat yang terdiri atas dana perimbangan, dana otonomi khusus, dana keistimewaan, dan dana desa, transfer antar daerah atas pendapatan bagi hasil dan bantuan keuangan), serta lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Banyaknya potensi pariwisata yang ada di Kabupaten Banyuwangi, dapat dilakukan pengembangan agar mendapatkan hasil untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Pariwisata merupakan salah satu penghasil pendapatan yang cukup besar, sehingga sangat diperlukan adanya pengembangan-pengembangan potensi pariwisata. Seperti yang telah dilakukan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dengan memperbanyak obyek wisata, meningkatkan pelayanan pada destinasi wisata yang telah ada, mengadakan kebijakan, contohnya menggunakan aplikasi *e-ticketing* (tiket elektronik), mengadakan berbagai macam promosi agar menarik minat pengunjung domestik maupun mancanegara.

³ Kabupaten Banyuwangi. <http://radiovisfm.com/2018/04/12/banyuwangi-meraih-penghargaan-indonesia-content-marketing-award-2018/> (diakses pada tanggal 4 Juni 2018, Pukul 07.50)

Dalam penelitian ini, fokus kepada pendapatan asli daerah yang bersumber dari pariwisata, dan pendapatan dari Pantai GWD, sehingga data yang dicantumkan adalah pendapatan daerah Kabupaten Banyuwangi dari sektor pariwisata dan destinasi wisata pantai GWD.

Berikut adalah pendapatan daerah Kabupaten Banyuwangi dari sektor pariwisata:

Tabel 2 Realisasi Target Pendapatan P-APBD 2017 Dinas Pariwisata Kab. Banyuwangi

No	Dinas Pariwisata	Target : 29.436.970.160	Realisasi : 21.957.137.992
1	Pajak Hotel	8.077.044.425	5.657.040.953
2	Pajak Restoran	15.501.533.717	12.415.203.896
3	Pajak Hiburan	3.531.250.000	2.130.360.696
4	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	799.680.000	627.940.600
5	Retribusi Penginapan, Pesanggrahan, vila	46.143.750	52.800.000
6	Retribusi Tempat Rekreasi dan OR	908.660.310	764.005.000
7	PAD lainnya yang sah	5.036.385	1.172.886
8	Bagi hasil dari pihak ketiga	567.621.574	308.613.962

Sumber: Diolah diolah berdasarkan data primer, 2018

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa pendapatan dari GWD termasuk pada angka 6, yaitu Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, karena GWD merupakan tempat wisata yang disediakan, dimiliki serta dikelola sendiri oleh Pemerintah. Hal ini berdasarkan pada UU PDRD.

2. Pengembangan Pantai Grand Watu Dodol dan Implikasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banyuwangi

Pengembangan yang dilakukan pada pantai GWD sama dengan upaya pengembangan diatas seperti meningkatkan pelayanan, menggunakan aplikasi *e-ticketing*, di promosikan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Namun selain itu, ada beberapa upaya yang dilakukan untuk menarik pengunjung serta untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, sebagai berikut:⁴

a. Melarang pendirian hotel di kawasan pariwisata

Pendirian hotel di kawasan pariwisata akan menghambat usaha penginapan yang di jalankan oleh masyarakat sekitar, sehingga pemerintah melakukan pelarangan untuk mendirikan hotel ini dengan tujuan agar pengunjung dapat menginap di *Home Stay* yang di sediakan oleh masyarakat sekitar destinasi wisata.

b. Melarang rumah makan besar masuk

Melarang pendirian rumah makan besar di sekitar destinasi wisata memiliki tujuan untuk mengoptimalkan masyarakat lokal untuk berjualan makanan di destinasi wisata tersebut, sehingga dengan adanya pengembangan potensi pariwisata dapat meningkatkan perekonomian untuk masyarakat sekitar.

c. Pengelolaan Sampah

Pengelolaan sampah dilakukan untuk menjaga kebersihan dan membuat pengunjung nyaman. Bukan hanya oleh petugas

⁴Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Produk Pariwisata (Bapak Marhen) pada 23 Mei 2018.

kebersihan, di pantai GWD sistem yang dilakukan dalam mewujudkan program pengelolaan sampah adalah dengan cara, pengunjung yang datang dari pintu masuk diberikan kantong sampah ketika memasuki kawasan wisata untuk menyimpan sampah yang dihasilkannya dan membawa kembali kantong tersebut ketika keluar dari destinasi wisata pantai GWD. Dengan program yang dilakukan ini, Kabupaten Banyuwangi meraih penghargaan kategori *clean tourist city* pada *ASEAN Tourism Standard Award*.⁵

d. Lowongan pekerjaan untuk pemuda local dan masyarakat sekitar

Adanya pengembangan destinasi wisata, membuat peluang beberapa pekerjaan bagi pemuda lokal seperti penjaga tiket, parkir, membuka bengkel, petugas kebersihan, serta masyarakat sekitar dapat membuka usaha seperti berjualan, menyewakan perahu, menyewakan alat untuk *snorkeling*, maupun usaha yang lainnya.

Berikut ini adalah pendapatan yang diperoleh dari destinasi wisata pantai Grand Watu Dodol:

Tabel 3 Pendapatan GWD Tahun 2016 hingga 2017

No	Tahun	Tiket Masuk (Rp)	Tiket Parkir (Rp)	Jumlah
1	2016	205.900.000	98.778.000	304.678.000
2	2017	394.045.000	109.168.000	503.213.00

Sumber: Diolah berdasarkan data primer, 2018

Jumlah keseluruhan dari tiket masuk dan tiket parkir tahun 2016 adalah Rp 304.678.000,-. Sedangkan Jumlah keseluruhan dari tiket masuk dan tiket parkir tahun 2017 adalah Rp 503.213.00,-.

⁵ Kabupaten Banyuwangi. <https://travel.kompas.com/read/2018/01/28/140000127/banyuwangi-raih-penghargaan-kota-bersih-di-tingkat-asean> (diakses pada tanggal 4 Juni 2018, pukul 07.40)

Retribusi Daerah, selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

Pantai Grand Watu Dodol adalah pariwisata yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah sehingga pendapatan yang diperoleh dari GWD merupakan retribusi jasa usaha sesuai dengan UU PDRD.⁶ Sebagaimana di jelaskan, Objek Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 huruf e, pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah (Pasal 132 ayat 1 UU PDRD). Serta, Objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 huruf i adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah (Pasal 136 ayat 1 UU PDRD).

Dapat dilihat pada Tabel 3, bahwa pendapatan Pantai GWD meningkat dari tahun 2016 yang menghasilkan Rp 304.678.000,-. Sedangkan pada tahun 2017 menghasilkan Rp 503.213.000,-. Peningkatan pendapatan daerah dari pantai GWD pada tahun 2017 dengan jumlah Rp 198.535.000,-.

Pengembangan pantai GWD dilakukan pada tahun 2015, sebelum pengembangan, GWD tidak menghasilkan pendapatan (nol rupiah). Sehingga pada tahun 2016 GWD mulai menghasilkan pendapatan untuk

⁶ Hasil wawancara dengan Kasi Optimalisasi Pendapatan Daerah (Ibu Nur Soetjiati) Pada 23 Mei 2018.

PAD. Setelah dilakukannya pengembangan potensi pantai GWD terdapat peningkatan pendapatan yang awalnya nol rupiah, kemudian mulai tahun 2016 hingga 2017 terdapat peningkatan pada pendapatan pantai GWD. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 9 huruf b Perda RIPK, b. untuk meningkatkan kontribusi sektor pariwisata bagi peningkatan pendapatan terutama masyarakat golongan ekonomi menengah kebawah dan pendapatan asli daerah.

C. Hambatan dan Upaya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi Berdasarkan Pasal 9 huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Banyuwangi

Pengembangan potensi pariwisata di Kabupaten Banyuwangi yang dilakukan dengan cara:

- a. memperbanyak obyek wisata,
- b. Meningkatkan pelayanan pada destinasi-destinasi pariwisata,
- c. menggunakan Aplikasi *E-ticketing* (tiket elektronik,
- d. Promosi.
- e. Melarang pendirian hotel di kawasan pariwisata
- f. Melarang rumah makan besar masuk
- g. Pengelolaan sampah yang baik.

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, bidang Pariwisata memiliki indikator kerja utama, yaitu:⁷

⁷ Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Produk Pariwisata (Bapak Marhen). pada 23 Mei 2018.

- a) Kunjungan wisatawan, untuk domestik 5.000.000 (lima juta), dan mancanegara 100.000 (seratus ribu).
- b) Lama tinggal wisatawan, sebelumnya 0.2 hari, sekarang 2 hari, target 2,2 hari.
- c) Pengeluaran wisatawan selama wisata, sebelumnya wisatawan domestik Rp150.000,- (seratus limapuluh ribu rupiah), wisatawan manca negara Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), sekarang mencapai Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- d) Pendapatan asli daerah target Rp 37.000.000.000,- (tiga puluh tujuh milyar rupiah).

Pemenuhan indikator kerja utama/target tersebut dapat diwujudkan dengan adanya pengembangan potensi pariwisata yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Pengembangan yang dilakukan tersebut tidak berjalan dengan lancar. Terdapat beberapa hambatan yang dialami oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi.

1. Hambatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangidalam Pengembangan Potensi Pariwisata

Pengembangan potensi pariwisata yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, bidang pariwisata berdasarkan Pasal 9 huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Banyuwangi, untuk meningkatkan kontribusi sektor pariwisata untuk

meningkatkan pendapatan terutama bagi masyarakat golongan ekonomi menengah kebawah dan pendapatan asli daerah, dalam pelaksanaannya mendapatkan beberapa hambatan, tidak selalu berjalan dengan lancar, ada beberapa hambatan yang dialami. Hambatan yang dialami adalah sebagai berikut:

- a. Rendahnya kreatifitas pengelola destinasi dalam peningkatan pelayanan pada destinasi pariwisata.
- b. Adanya kecurangan dilapangan terhadap pendapatan dari tiket masuk dan tiket parkir.
- c. Kurang pemahaman terhadap penggunaan aplikasi *e-ticketing* oleh pengelola bagian tiket.

Terkait pengembangan pantai GWD, ada beberapa pendapat masyarakat yang bekerja dan berjualan di destinasi wisata GWD⁸. Ada beberapa kelebihan dan kekurangan yang di rasakan, kelebihan nya adalah mendapat pekerjaan sebagai Tenaga Harian Lepas, berjualan, serta membuka usaha bengkel, pengunjung meningkat, mendapat penghargaan, bangunan permanen, fasilitas lengkap. kekurangannya adalah bangunan yang kurang kokoh dan tidak bertahan lama, lahan parkir kurang luas, letak warung kurang strategis yang menyebabkan pendapatan berkurang bagi penjual. Pemerintah agar menampung dan memenuhi harapan masyarakat untuk merenovasi menghadap ke pantai agar lebih strategis, serta memperbaiki bangunan yang kurang kokoh dengan menggunakan anggaran sebaik mungkin.

⁸ Hasil wawancara dengan masyarakat sekitar yang bekerja dan berjualan di Pantai GWD. (24 Mei 2018)

2. Upaya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi dalam menyelesaikan hambatan Pengembangan Potensi Pariwisata

Pengembangan potensi pariwisata yang dilakukan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Bidang Pariwisata untuk meningkatkan kontribusi sektor pariwisata untuk meningkatkan pendapatan terutama bagi masyarakat golongan ekonomi menengah kebawah dan pendapatan asli daerah, adalah sebagai berikut:

a. mengadakan pelatihan

Pelatihan dilakukan kepada seluruh pengelola destinasi pariwisata yang ada di Kabupaten Banyuwangi, sehingga dari pihak pemerintah dan pengelola dapat memunculkan ide-ide baru pada destinasi pariwisata seperti kendaraan ATV di Pantai Grand Watu Dodol, pengunjung dapat berfoto di bawah air ketika *snorkeling* maupun *diving*, serta meningkatkan seluruh pelayanan pada destinasi-destinasi pariwisata.

b. menggunakan aplikasi *E-ticketing* (tiket elektronik)

Aplikasi *e-ticketing* ini diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 81 Tahun 2016 Tentang Pembayaran dan Pelaporan Pajak Parkir, Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan Secara Elektronik. Sistem bekerjanya aplikasi tiket elektronik ini yaitu, tiket masuk dan tiket parkir yang di dikeluarkan dalam bentuk cetak bukti pembayaran dan setiap pencetakan langsung tercatat di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi. Hal ini

dilakukan untuk menghindari kecurangan-kecurangan yang ada di lapangan.

c. dilakukan upaya pelatihan kembali

Pelatihan kembali untuk para petugas yang menjaga loket tiket pada destinasi pariwisata yang ada di Kabupaten Banyuwangi hingga paham dan mengerti menggunakan aplikasi tersebut. Sehingga tidak ada kesalahan maupun kekurangan terkait dengan pengelolaan tiket yang ada pada destinasi pariwisata di seluruh wilayah Kabupaten Banyuwangi.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengembangan potensi pariwisata untuk meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Banyuwangi dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Salah satu pariwisata yang dikembangkan adalah Pantai Grand Watu Dodol. Pantai GWD adalah pariwisata yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah sehingga pendapatan yang diperoleh dari GWD merupakan retribusi jasa usaha sesuai dengan UU PDRD.¹ Sebagaimana di jelaskan, Objek Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 huruf e, pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah (Pasal 132 ayat 1 UU PDRD). Serta, Objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 huruf i adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah (Pasal 136 ayat 1 UU PDRD). Setelah dilakukannya pengembangan potensi pantai GWD terdapat peningkatan pendapatan yang awalnya nol rupiah, kemudian mulai tahun 2016 hingga 2017 terdapat peningkatan pada pendapatan pantai GWD. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 9 huruf b Perda RIPK, b. untuk meningkatkan kontribusi sektor pariwisata bagi peningkatan pendapatan terutama masyarakat golongan ekonomi menengah kebawah dan pendapatan asli daerah.

¹ Hasil wawancara dengan Kasi Optimalisasi Pendapatan Daerah (Ibu Nur Soetjiati) Pada 23 Mei 2018.

2. Berbagai upaya telah dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi dalam menghadapi hambatan dalam pengembangan potensi pariwisata di Kabupaten Banyuwangi, dengan upaya tersebut dapat meningkatkan pendapatan asli daerah. Selain meningkatkan pendapatan asli daerah, pengembangan potensi pariwisata pantai GWD yang dilakukan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Bidang Pariwisata dapat meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar destinasi pariwisata. Adanya pengembangan tersebut, dapat membuka lowongan pekerjaan maupun usaha di sekitar destinasi pantai GWD untuk masyarakat sekitar. Hal ini telah sesuai dengan Pasal 9 huruf b Perda RIPK Kabupaten Banyuwangi, b. untuk meningkatkan kontribusi sektor pariwisata bagi peningkatan pendapatan terutama masyarakat golongan ekonomi menengah kebawah dan pendapatan asli daerah. Pengembangan tersebut adalah sebagai berikut: memperbanyak obyek wisata, meningkatkan pelayanan pada destinasi-destinasi pariwisata, menggunakan aplikasi *E-ticketing* (tiket elektronik), promosi, pengelolaan sampah, melarang pendirian hotel di kawasan pariwisata, melarang rumah makan besar masuk, lowongan pekerjaan untuk pemuda lokal.

B. Saran

1. Pengembangan potensi pariwisata Kabupaten Banyuwangi khususnya pantai GWD, yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi memiliki tujuan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah serta perekonomian masyarakat terutama masyarakat ekonomi menengah kebawah. Pemerintah dapat melakukan hal lain, dengan mengadakan acara, lomba, maupun pertunjukan di lokasi destinasi wisata Pantai Grand Watu Dodol untuk menarik lebih banyak pengunjung serta dapat meningkatkan pendapatan asli daerah.
2. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi dapat di tambahkan dengan membuat kotak saran elektronik agar masyarakat maupun pengunjung dapat mengajukan keluhan atau laporan yang ingin disampaikan terkait pengembangan potensi wisata pantai Grand Watu Dodol. Sehingga pemerintah dapat langsung menampung serta menanggapi dan menyelesaikan permasalahan yang terjadi di destinasi wisata Pantai GWD.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ahmad Fikri Hadin, 2013, **Eksistensi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan di Era Otonomi Daerah**, Yogyakarta, Genta Press.
- Bambang Sunggono, 2011, **Metodologi Penelitian Hukum**, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
- Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi, **Visitor's Guide Book Banyuwangi East Java Indonesia**, Banyuwangi, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi, 2017
- Ida Zuraida, 2012, **Teknik Penyusunan Peraturan Daerah**, Jakarta, Sinar Grafika.
- Lukman Hakim, 2012, **Filosofi Kewenangan Organ dan Lembaga Daerah**, Malang, Setara Press.
- Mudrajad Kuncoro, 2014, **Otonomi Daerah Menuju Era Baru Pembangunan Daerah Edisi 3**, Jakarta, Erlangga.
- Pandiang Roristua, 2015, **Hukum Pajak**, Yogyakarta, Graha Ilmu.
- Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, 2017, **Bukan Cuma Wisata Biasa, Kiprah Banyuwangi Membangun Destinasi Branding Hingga Sabet Penghargaan PBB**, Banyuwangi, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
- Soerjono Soekanto, 1981, **Pengantar Penelitian Hukum**, Jakarta, UI Press.
- Sri Soemantri, 2014, **Otonomi Daerah**, Bandung, PT Remaja Rosdakarya.
- Surarno Siswanto, 2014, **Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia**, Jakarta, Sinar Grafika.

Sumber Internet

- Kabupaten Banyuwangi. <https://www.banyuwangikab.go.id/profil/gambaranumum.html> diakses pada 31 Mei 2018, Pukul 14.00
- Kabupaten Banyuwangi. <https://www.banyuwangikab.go.id/pemerintahan/visi-dan-misi.html> diakses pada 31 Mei 2018, Pukul 14.30
- Kabupaten Banyuwangi. <https://www.banyuwangikab.go.id/skpd/unit/21601/dinas-kebudayaan-dan-pariwisata.html> diakses pada tanggal 8 Mei 2018, Pukul 20.00

Berita

- Ilex Vis. **Banyuwangi Meraih Penghargaan Indonesia Content Marketing Award 2018**. <http://radiovisfm.com/2018/04/12/banyuwangi-meraih-penghargaan-indonesia-content-marketing-award-2018/> diakses pada tanggal 4 Juni 2018, Pukul 07.50.
- Ira Rachmawati. **Banyuwangi Raih Penghargaan Kota Bersih di Tingkat ASEAN**. <https://travel.kompas.com/read/2018/01/28/140000127/banyuwangi-raih-penghargaan-kota-bersih-di-tingkat-asean> diakses pada tanggal 4 Juni 2018, pukul 07.40.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049.
- Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Banyuwangi.